



NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT

The West Papua Republic Of Federated State

Alamat Kantor : JL. Batu Dua, Sabaron Yaru, Sentani Barat, Papua

PERNYATAAN PRESIDEN NFRPB TENTANG PERSYARATAN SUATU ORGANISASI PAYUNG BANGSA PAPUA DI NEGERI PAPUA BARAT

Bpk/Ibu/Sdr/i para pemimpin komponen perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua di dalam dan di luar Negeri Papua Barat yang saya kasihi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, para pemimpin dan atau pengamat politik kemerdekaan Papua Barat yang saya hormati.

Puji Tuhan Yesus, karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk hidup dan berjuang.

Saya sebagai pribadi maupun sebagai ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP), serta sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) menyampaikan permintaan maaf, karena tidak dapat hadir dalam pertemuan antara komponen-komponen Papua Merdeka di Negara Vanuatu yang kita cintai ini.

Terimakasih dan hormat saya yang tak terhingga kepada para pemimpin negara-negara anggota Malanesian Spearhead Group (MSG) yang secara konsisten dan kontinyu terus menyuarkan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, mantan wilayah koloni Netherland Niew Guinea (Papua Belanda) sampai sekarang yang dianeksasi oleh pemerintah Republik Indonesia lewat TRI KOMANDO RAKYAT tahun 1961 oleh Sukarno, Presiden Pertama Republik Indonesia. Secara khusus saya sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada P.M Vanuatu dan seluruh masyarakat Vanuatu atas dukungannya selama ini.

Walaupun saya tidak hadir secara fisik, tetapi secara tertulis, saya hadir dalam menyampaikan pernyataan sebagai Kepala Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) tentang persyaratan terbentuknya suatu organisasi payung Bangsa Papua di Negeri Papua Barat ini.

Saya selaku kepala Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) merasa sangat perlu sekali menyampaikan persyaratan terbentuknya suatu organisasi payung bagi kemerdekaan Papua Barat . Sebab selama ini, kita ditolak terus di dalam setiap summit MSG dengan berbagai alasan yang kontroversial.

Persyaratan atau kriteria terbentuknya suatu organisasi payung dan inklusif bagi kemerdekaan Papua Barat harus ada. Agar, kita bersama-sama dengan negara-negara anggota MSG dapat menggunakannya, untuk mengukur dan menentukan salah satu organisasi dari sekian banyak organisasi perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang memenuhi kriteria dimaksud

sebagai organisasi payung. Sedangkan yang lain tetap, sebagai organisasi politik atau untuk menjadi partai politik.

Sehingga kita tidak lagi saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa pemahaman yang baik berdasarkan logika, ilmu politik, ilmu hukum internasional serta demokrasi dan prosedur internasional sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun kriteria atau persyaratan terbentuknya suatu organisasi payung yang inklusif bagi kemerdekaan politik Papua Barat yang kita maksudkan adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Payung dan inklusif yang kita maksudkan adalah organisasi yang setingkat dengan body nation state atau dalam bentuk sebuah negara Papua Barat;
2. Organisasi payung kemerdekaan dimaksud dalam point 1 di atas harus terbentuk dalam Kongres Rakyat Papua sebagai mekanisme demokrasi tertinggi bangsa Papua di Negeri Papua Barat;
3. Kongres Rakyat Papua harus dilaksanakan di dalam negeri Papua Barat di Ibu kota Jayapura, yang mana selama ini sudah berlangsung tiga kali sejak tahun 1961.;
4. Kongres Rakyat Papua harus mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat;
5. Deklarasi atau proklamasi kemerdekaan Papua Barat seperti tersebut pada point 4 di atas harus memenuhi syarat-syarat hukum publik internasional;
6. Kongres Rakyat Papua harus membentuk organisasi payung yang disebut Body Nation State atau Negara Papua Barat berdasarkan proklamasi atau deklarasi kemerdekaan seperti tersebut pada point 3 dan 4 di atas, sebagai payung hukumnya;
7. Struktur Organisasi Payung Papua Barat atau body nation state atau negara Papua Barat harus tegas dan jelas serta tertata sampai ke tingkat wilayah, daerah kabupaten, distrik dan komunitas kampung;
8. Organisasi Body Nation State atau sebuah Negara Papua Barat berada dan berkedudukan di dalam negeri Papua Barat;
9. Pemimpin tertinggi dan para pemimpin lain dari organisasi payung yang dimaksud dalam point 1 di atas harus berkedudukan di dalam negeri Papua Barat di ibukota Jayapura, sedangkan para diplomat diluar negeri;
10. Organisasi payung yang inklusif dimaksud sekarang secara nyata masih ada, hidup, dan bergerak serta berjuang untuk kemerdekaan politik bangsa Papua di negeri Papua Barat dan di luar negeri secara damai dan demokrasi atau bermartabat;
11. Organisasi tersebut harus melaksanakan nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal;
12. Organisasi tersebut harus bekerja berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Viena Convention On The Law Of Treaties Between States tahun 1969 dan Viena Convention On The Law Of Treaties Between States and Organizations or Between Organizations tahun 1986.

Syarat-syarat atau kriteria-kriteria tersebut sudah mengandung unsur-unsur penting dari sisi demokrasi, politik dan prinsip-prinsip umum hukum internasional secara ketat dan tegas.

Untuk menyelesaikan perjuangan kemerdekaan Papua Barat lewat mekanisme politik dan prosedur hukum internasional. Kita tidak boleh main-main lagi dengan kepentingan egoisme, sukuisme, agamaisme, kelompokisme, seniorita, yuniorrita dan isme sejenis lainnya. Karena sudah banyak korban di pihak rakyat Papua Barat, baik korban waktu, tenaga, uang, harta benda dan korban jiwa manusia Papua yang dibunuh oleh aparat Polisi dan Tentara Indonesia dan masih banyak lagi yang menderita di hutan-hutan, di kampung-kampung, di kota-kota dan di dalam penjara Indonesia.

Kita sedang termarginal, menjadi minoritas dan sedang menuju kepada kepunahan dengan adanya indikasi proses creeping genocide atau slow moving genocide. Pembangunan di segala bidang untuk siapa?

Oleh karena itu, syarat-syarat atau kriteria-kriteria tersebut di depan tidak boleh dikurangi dan hanya boleh ditambah dalam point-point tersendiri, tetapi tidak boleh bertentangan satu sama lain dalam kriteria tersebut.

Silahkan, apakah forum ini yang memutuskan dan menetapkan atau kita serahkan kepada negara-negara anggota MSG untuk memutuskan dan menetapkan organisasi yang memenuhi syarat-syarat itu untuk menjadi organisasi payung yang inklusif.

Kita dari pihak delegasi Negara Federal Republik Papua Barat yang hadir di negara Vanuatu dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan syarat-syarat atau kriteria-kriteria dimaksud di depan kepada forum ini dan juga kepada para pemimpin negara-negara anggota MSG.
2. Melakukan sosialisasi pengenalan Negara Federal Republik Papua Barat kepada MSG dan PIF, untuk mendapat pengakuan substansional yang menggembirakan dari negara-negara anggota MSG dan PIF serta dari Indonesia dengan proses peralihan kedaulatan. Kita menempuh dengan cara-cara damai, demokratis dengan tiga agenda utama luar negeri, yakni :
 - 1) Lobby politik internasional dengan tema “ Tak Kenal Maka Tak Sayang”, sesuai pasal 33 ayat 1 Piagam PBB;
 - 2) Negosiasi langsung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga sesuai dengan pasal 33, ayat 1 Piagam PBB;
 - 3) Gugatan hukum atas aneksasi Negeri Papua Papua Barat oleh Indonesia sejak tahun 1961, yang secara faktual dimulai dengan adanya infiltrasi dan infasi militer Indonesia sejak januari 1962 sampai sekarang ; berdasarkan pasal 35, ayat 2 Piagam PBB. Karena aneksasi suatu wilayah bangsa lain, baik yang sudah berpemerintahan maupun yang belum berpemerintahan sendiri dengan alasan apapun adalah melanggar hukum bangsa-bangsa.

Jika dalam forum ini ada proses pembentukan suatu organisasi baru dan memilih pemimpin organisasi serta menetapkan agenda-agenda baru, maka Negara Federal Republik Papua Barat tidak ikut mengambil bagian untuk itu. Bila ada satu dua orang dari Negara Federal

yang ikut, itu adalah atas nama pribadi sendiri. Karena hanya Kongres Rakyat Papua sebagai forum atau mekanisme demokrasi tertinggi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, yang berhak memutuskan dan menetapkan serta membentuk organisasi Body Nation State atau Negara Papua Barat, sebagai organisasi payung yang tertinggi dan terbesar, dengan deklarasi atau proklamasi kemerdekaan sebagai payung hukumnya.

Kalau suatu organisasi payung yang inklusif tidak terbentuk melalui mekanisme kongres Rakyat Papua di Negeri Papua Barat dengan kriteria-kriteria seperti tersebut di atas, maka Negara Federal Republik Papua Barat akan tetap bertahan dan melaksanakan agenda-agenda luar negeri dan domestik yang sudah ada menuju pengakuan dan proses peralihan kedaulatan secara damai dan demokrasi atau bermartabat. Permasalahan pro dan kontra adalah hal-hal yang wajar terjadi dalam berdemokrasi dan dapat diselesaikan secara konstitusional.

Demikianlah pernyataan persyaratan atau kriteria terbentuknya suatu organisasi payung yang inklusif bagi bangsa Papua di Negeri Papua Barat. Atas pengertian dan bantuan kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Dibuat di : Jayapura
Pada Tanggal : 01-September-2014

**Presiden
Negara Federal Republik Papua Barat**



Forkorus Yaboisembut, S.Pd